



RENCANA STRATEGIS

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN BELITUNG
TAHUN 2024-2026

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 merupakan bagian dari program pembangunan Pemerintah Kabupaten Belitung yang merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk 3 (tiga) tahun, disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra periode sebelumnya dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran Kabupaten Belitung sebagaimana diamanatkan pada RPD Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026.

Diharapkan dengan disusunnya Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026, dapat memberikan manfaat dan dijadikan acuan dalam pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Tanjungpandan, 25 Juli 2023

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Belitung



MOHAMMAD IQBAL, ST
Pembina Utama Muda
NIP. 19641107 200003 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	8
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	16
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	36
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	38
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	38
3.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026	40
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi	41
3.4. Telaahan RTRW	43
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	44
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	46
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	46
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	48
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	50
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	96
BAB VIII PENUTUP	97

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

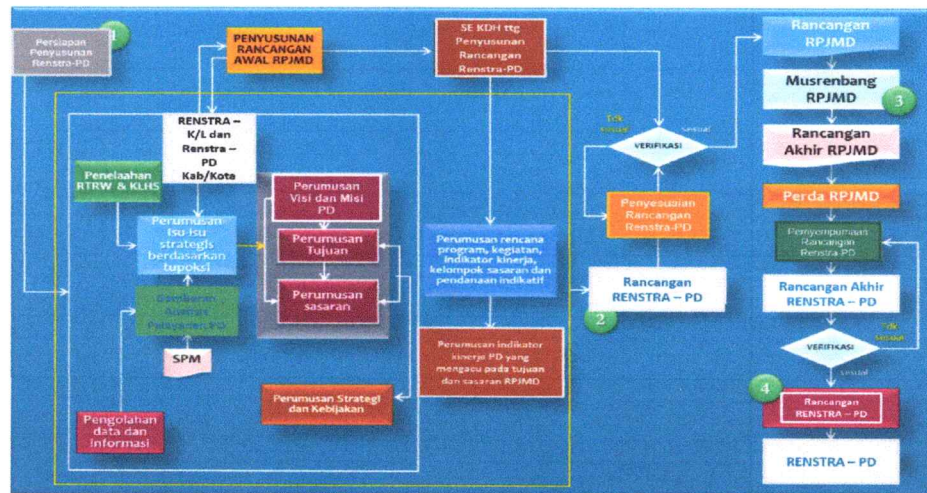
Perencanaan pembangunan memiliki peran yang sangat signifikan dan menjadi dasar atau acuan dalam mendorong dan memberikan arah pembangunan agar berjalan efektif dan efisien serta mampu mencapai sasaran yang diinginkan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi pemerintah, maupun antara Pusat dan Daerah. Selain itu, perencanaan pembangunan juga bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, pengoptimalan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Pada tingkat Perangkat Daerah (PD), dokumen perencanaan pembangunan yang harus disusun terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu: (i) Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen perencanaan jangka menengah PD; dan (ii) Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai dokumen perencanaan tahunan PD.

Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, adapun tahapan penyusunan Renstra yang terdiri atas:

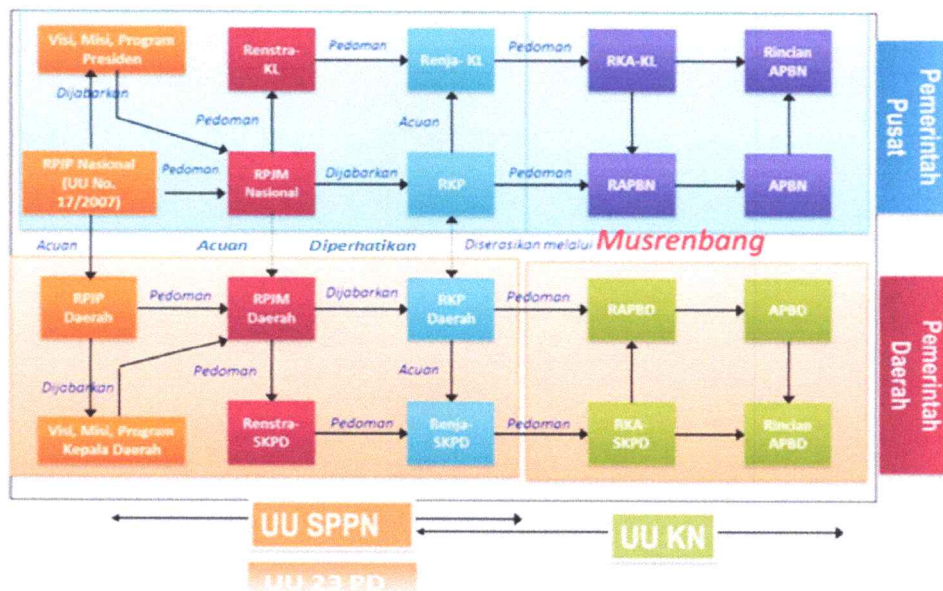
- a) Persiapan penyusunan;
- b) Penyusunan rancangan awal;
- c) Penyusunan rancangan;
- d) Pelaksanaan forum PD/lintas PD;
- e) Perumusan rancangan akhir; dan
- f) Penetapan.

Gambar 1.1
Proses Penyusunan Renstra PD



Renstra PD menjadi pedoman dalam melakukan penyusunan Renja PD, selanjutnya Renja PD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Skema hubungan perencanaan dan anggaran dapat digambarkan dibawah ini :

Gambar 1.2



Berdasarkan gambar 1.2 di atas terlihat jelas adanya keterkaitan hubungan dokumen yang satu dengan dokumen lainnya, baik dari dokumen yang bersifat Nasional, maupun dokumen yang berada di tataran daerah. Hal utama yang harus diperhatikan untuk menyusun Renstra PD adalah Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) yang berhubungan dengan Perangkat Daerah. Renstra K/L ini kemudian yang diturunkan dan dijabarkan ke dalam RPJMN dan RPJPN maupun RPJPD dan RPJMD untuk memudahkan menuangkan dalam program kegiatan sesuai bidang, maka diturunkanlah melalui Renstra PD.

Adapun penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru dikarenakan berakhirnya masa jabatan Bupati Belitung pada Tahun 2023. Menindaklanjuti hal tersebut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung sebagai salah satu organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk guna melaksanakan urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel di era keterbukaan informasi di Kabupaten Belitung melaksanakan penyusunan Renstra PD Tahun 2024-2026 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 dilaksanakan melalui pendekatan proses perencanaan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) secara teknokratik dan partisipatif, serta menerapkan prinsip perencanaan secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS), untuk mewujudkan Renstra sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah, maka Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung disusun dengan memperhatikan tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah periode 2024-2026. Penyusunan Renstra dimulai dari tahapan persiapan sebagai bagian dari kegiatan telaahan terhadap peraturan dan kebijakan maupun perumusan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir renstra dan menjadi bahan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);
17. Peraturan Bupati Belitung Nomor 79 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung;
18. Peraturan Bupati Belitung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026;
19. Peraturan Bupati Belitung Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 adalah memberikan arahan dan pedoman perangkat daerah serta seluruh aparatur dalam melaksanakan tugasnya dengan membangun komitmen bersama untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah secara berkesinambungan dan berkelanjutan dalam menentukan prioritas di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik sehingga tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2024-2026 dapat tercapai.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 adalah :

- a. Menjadi pedoman strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengoperasionalkan rencana program kegiatan pembangunan selama 3 (tiga) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung.
- b. Menjadi dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja yang akan dilakukan selama tiga tahun.
- c. Menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini.
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan komunikasi dan informatika.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024-2026 terdiri dari 8 (delapan) Bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistem Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam bab ini memuat tentang uraian tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026, telaahan renstra K/L dan renstra perangkat daerah provinsi, telaahan rencana tata ruang wilayah dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN

Dalam bab ini memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam bab ini memuat strategi dan kebijakan pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung tahun 2024-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam bab ini memuat rencana program dan kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung periode 2024-2026.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam bab ini memuat indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung dan Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Belitung. Dimana tugas dan fungsi organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung diatur dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 79 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung.

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik di Daerah dan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan kehumasan, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain, layanan infrastruktur dasar data *center*, *disaster recovery center* dan teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah, layanan keamanan informasi *e-government*, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan manajemen data dan informasi *e-government*, layanan akses internet dan intranet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi *smart city*, penyelenggaraan *government chief information officer* (GCIO), pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat lingkup daerah, persandian dan statistik;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan kehumasan, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan

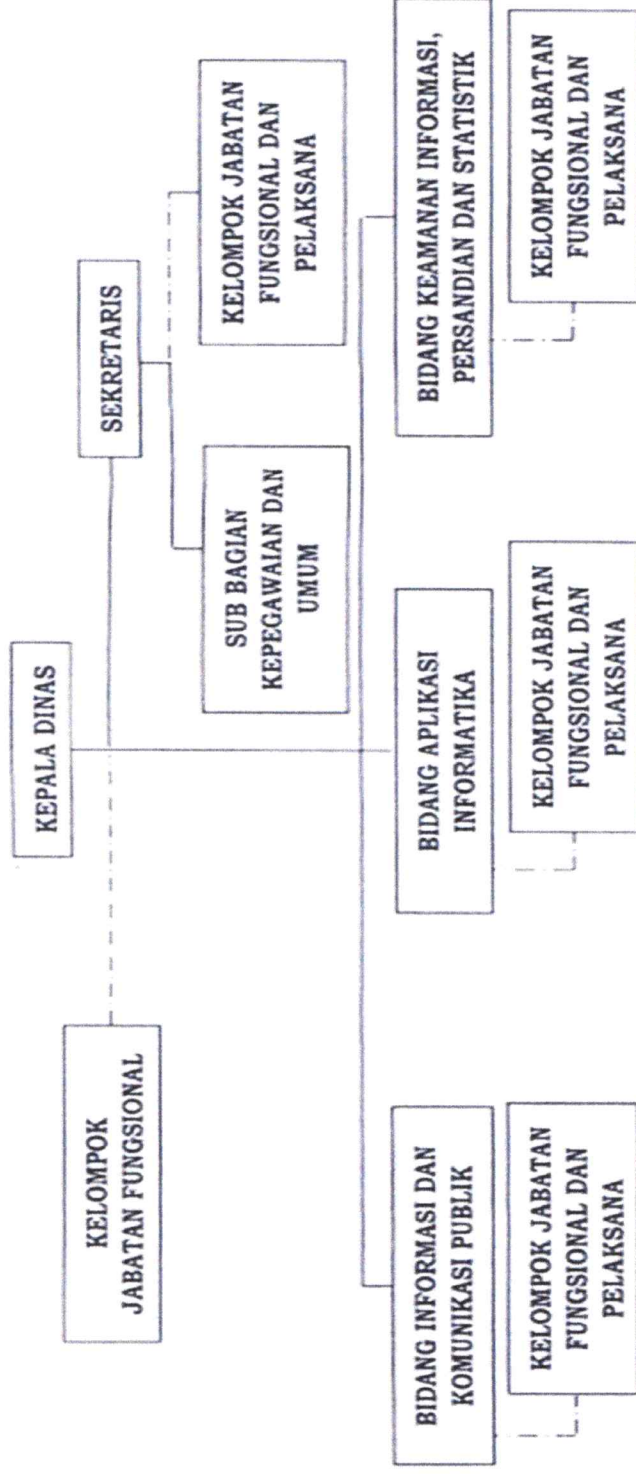
nama domain dan sub domain, layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* dan teknologi informasi dan komunikasi, layanan keamanan informasi *e-government*, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan manajemen data dan informasi *e-government*, layanan akses internet dan intranet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi *smart city*, penyelenggaraan *government chief information officer* (GCIO), pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat lingkup daerah, persandian dan statistik;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tugasnya
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai sumber daya manusia sebanyak 33 orang yang mempunyai latar belakang pendidikan S2, S1, D3 dan SMA serta sumber daya berupa ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas berupa gedung dan peralatan kantor serta perlengkapannya.

Dalam pelaksanaan tugasnya selama kurun waktu lima tahun sebelumnya adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dan melaksanakan urusan sebagai berikut: peningkatan jaringan komunikasi dan keterjangkauan akses informasi berbasis teknologi. Dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 terdapat hambatan utama yaitu keterbatasan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung yang kurang memadai dan kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika belum sepenuhnya diserahkan.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BELITUNG



Sumber: Peraturan Bupati Belitung Nomor 79 Tahun 2022

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung, terdiri atas:

1. Kepala
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
4. Bidang Aplikasi Informatika
5. Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Kepala Dinas

Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administratif di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada Peraturan Bupati Belitung Nomor 79 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan;
- b. pengordinasian dan penyusunan rancangan produk hukum Daerah di bidang komunikasi dan informatika;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
- d. pengelolaan umum dan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, dan urusan ASN;
- e. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, manajemen komunikasi krisis, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 pada Peraturan Bupati Belitung Nomor 79 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik;
- b. monitoring opini dan aspirasi publik;
- c. monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah;
- d. pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik;
- e. pengelolaan media komunikasi publik;
- f. pelayanan informasi publik;
- g. layanan hubungan media;
- h. kemitraan dengan pemangku kepentingan;
- i. manajemen komunikasi krisis;
- j. penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
- k. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Aplikasi Informatika

Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik, nama domain, pusat data, sistem jaringan intra pemerintah daerah, sistem komunikasi intra pemerintah daerah, pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkup pemerintah daerah kabupaten, penatalaksanaan dan pengawasan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, keamanan informasi, data dan informasi elektronik, aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik, sistem

penghubung layanan pemerintah, ekosistem kota cerdas, sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah, dan *Government Chief Information Officer* (GCIO).

Bidang Aplikasi Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 pada Peraturan Bupati Belitung Nomor 79 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik, nama domain, pusat data, sistem jaringan intra pemerintah daerah, sistem komunikasi intra pemerintah daerah, pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkup pemerintah daerah kabupaten, penatalaksanaan dan pengawasan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, keamanan informasi, data dan informasi elektronik, aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik, sistem penghubung layanan pemerintah, ekosistem kota cerdas, sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah, dan *government chief information officer* (GCIO);
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik, nama domain, pusat data, sistem jaringan intra pemerintah daerah, sistem komunikasi intra pemerintah daerah, pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkup pemerintah daerah kabupaten, penatalaksanaan dan pengawasan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, keamanan informasi, data dan informasi elektronik, aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik, sistem penghubung layanan pemerintah, ekosistem kota cerdas, sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah, dan *government chief information officer* (GCIO);
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik, nama domain, pusat data, sistem jaringan intra pemerintah daerah, sistem komunikasi intra pemerintah daerah, pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkup pemerintah daerah kabupaten, penatalaksanaan dan pengawasan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, keamanan informasi, data dan informasi elektronik, aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik, sistem penghubung layanan pemerintah, ekosistem kota cerdas, sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah, dan *government chief information officer* (GCIO);

- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik, nama domain, pusat data, sistem jaringan intra pemerintah daerah, sistem komunikasi intra pemerintah daerah, pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkup pemerintah daerah kabupaten, penatalaksanaan dan pengawasan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, keamanan informasi, data dan informasi elektronik, aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik, sistem penghubung layanan pemerintah, ekosistem kota cerdas, sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah, dan *government chief information officer* (GCIO);
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik, nama domain, pusat data, sistem jaringan intra pemerintah daerah, sistem komunikasi intra pemerintah daerah, pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkup pemerintah daerah kabupaten, penatalaksanaan dan pengawasan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, keamanan informasi, data dan informasi elektronik, aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik, sistem penghubung layanan pemerintah, ekosistem kota cerdas, sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah, dan *government chief information officer* (GCIO);
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik

Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola keamanan informasi, persandian dan statistik sektoral.

Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 pada Peraturan Bupati Belitung Nomor 79 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang keamanan informasi, persandian dan statistik;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang keamanan informasi, persandian dan statistik;

- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang keamanan informasi, persandian dan statistik;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang keamanan informasi, persandian dan statistik;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang keamanan informasi, persandian dan statistik;
- f. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan keamanan informasi *e-Government* dan layanan manajemen data dan informasi *e-Government*;
- g. penyusunan peraturan teknis pengelolaan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah dan sumber daya persandian yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
- h. pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian informasi milik Pemerintah Daerah;
- i. pengelolaan proses pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah;
- j. perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah di lingkungan kabupaten;
- k. penyiapan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi, perangkat keras dan perangkat lunak persandian;
- l. pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
- m. pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
- n. penyiapan dokumen, bahan dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan survei statistik sektoral bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan Hak Asasi Manusia;
- o. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan dan metodologi survei bidang politik, hukum dan Hak Asasi Manusia;
- p. pelaksanaan dan koordinasi survei statistik sektoral bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan Hak Asasi Manusia;
- q. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan persandian dan statistik;
- r. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Berdasarkan data kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung pada Desember 2022, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebanyak 33 pegawai, yang terdiri dari 20 pegawai laki-laki (60,6%) dan 13 pegawai perempuan (39,4%) serta 8 orang tenaga non ASN. Berdasarkan jenjang pendidikan, untuk ASN Dinas Komunikasi dan Informatika didominasi oleh lulusan perguruan tinggi, yaitu lulusan S2, S1 dan D3, dengan jumlah total sebanyak 29 orang (87,8%) dan 4 orang (12,2%) lulusan SMP dan SMA. Jumlah dan komposisi pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2022, selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut :

Tabel 2.1
Alokasi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Belitung Tahun 2022

No	Unit Kerja	Jumlah		Ket
		Laki-laki	Perempuan	
1	Kepala Dinas	1	-	
2.	Sekretaris	1	-	
	1. Subbag Kepegawaian dan Umum	-	1	
	2. Fungsional Analisis Kebijakan Muda	1	-	
	3. Fungsional Umum	1	3	
	4. Non ASN	3	2	
3.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1	-	
	1. Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Muda	2	1	
	2. Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	1	-	
	3. Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana	-	2	
	4. Fungsional Umum	1	1	
	5. Non ASN	-	2	
4.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika	1	-	
	1. Fungsional Pranata Komputer	2	1	
	2. Fungsional Umum	4	2	
	3. Non ASN	1	-	
5.	Kepala Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik	-	1	
	1. Fungsional Sandiman Muda	1	-	
	2. Fungsional Sandiman Pertama	1	-	
	3. Fungsional Statistik Pertama	1	-	
	4. Fungsional Umum	1	1	
Jumlah		25	16	

Tabel 2.2
Jumlah SDM Dinas Komunikasi dan Informatika Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2022

Rincian	Jumlah PNS		Jumlah CPNS		Jumlah Total
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
Gol. IV	4	1	-	-	5
Gol. III	13	8	-	1	22
Gol. II	3	2	-	1	6
Gol. I	-	-	-	-	-

Tabel 2.3
Rincian SDM Dinas Kominfo Berdasarkan Golongan dan Pendidikan Terakhir Tahun 2022

Golongan PNS/CPNS	Pendidikan Terakhir																					
	S 3		S 2		S 1		D IV		D III		D II		D I		SMA		SMK		SMP		SD	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
PNS Gol. IV	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PNS Gol. III	-	-	-	-	11	4	-	-	-	3	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
PNS Gol. II	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
PNS Gol. I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CPNS Gol. IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CPNS Gol. III	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CPNS Gol. II	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CPNS Gol. I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	-	3	1	12	5	-	-	3	5	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 Yang Telah Mengikuti Diklat

No	Jenis Diklat	Jumlah Pegawai	Yang telah mengikuti dan lulus	Yang belum mengikuti
1	Pelatihan Kepemimpinan Nasional TK. II	1	0	1

2	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	4	2	2
3	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	1	0	1
4	Diklat Fungsional	13	4	9
5	Diklat Barang dan Jasa	33	11	22

2.2.2. Sumber Daya Aset/Modal

Sarana dan prasarana aparatur diperlukan untuk mendukung operasional dan pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika. Sarana dan prasarana aparatur yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan sarana pendukung untuk pelaksanaan pencapaian tugas dan fungsi dalam mencapai kinerja perangkat daerah. Berikut data sarana dan prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.5

Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Sampai dengan 2022

No	Jenis Barang	Satuan	Jumlah yang ada	Jumlah Ideal	Kurang/ Cukup	Kondisi Baik	Kondisi Rusak Ringan	Kondisi Rusak Berat	Ket
1	Electric generating set lainnya (dst)	Unit	2	2	Cukup	2	0	0	
2	Mobil	Unit	2	5	Kurang	2	0	0	
3	Sepeda Motor	Unit	12	15	Kurang	11	1	0	
4	Alat ukur Qlue / Thermometer digital portable Body Thermal Scanner	Unit	2	2	Cukup	2	0	0	
5	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	Unit	9	5	Cukup	4	0	5	
6	Lemari Besi/Metal	Unit	11	20	Kurang	11	0	0	
7	Lemari Kayu	Unit	3	10	Kurang	2	1	0	
8	Rak Besi	Unit	6	10	Cukup	6	0	0	
9	Rak Kayu	Unit	6	10	Cukup	6	0	0	
10	Filling Cabinet Besi	Unit	17	25	Kurang	12	0	5	
11	Lemari Kaca	Unit	2	5	Kurang	2	0	0	
12	Alat Penyimpanan Kantor lainnya	Unit	2			2	0	0	
13	CCTV - Camera Control Television System	Unit	3	50	Kurang	3	0	0	
14	Mesin Absensi	Unit	2	2	Cukup	2	0	0	
15	Teralis	Unit	5	5	Cukup	5	0	0	

No	Jenis Barang	Satuan	Jumlah yang ada	Jumlah Ideal	Kurang/ Cukup	Kondisi Baik	Kondisi Rusak Ringan	Kondisi Rusak Berat	Ket
16	Alat Kantor Lainnya Kunci Pintu Digital / eGuard MD1612	Unit	3	3	Cukup	3	0	0	
17	Kursi Besi/Metal	Unit	5	10	Kurang	5	0	0	
18	Meja Rapat	Unit	20	30	Kurang	20	0	0	
19	Meja 1/2 Biro	Unit	31	35	Kurang	26	0	5	
20	Kursi Rapat	Unit	57	100	Kurang	57	0	0	
21	Kursi Tamu	Unit	4	5	Cukup	3	0	1	
22	Kursi Putar	Unit	16	25	Kurang	15	0	1	
23	Kursi Biasa	Unit	9	20	Kurang	3	1	5	
24	Bangku Tunggu	Unit	2	4	Kurang	2	0	0	
25	Kursi Lipat	Unit	30	50	Kurang	30	0	0	
26	Meja Komputer	Unit	22	25	Cukup	21	0	1	
27	Meubeleur lainnya Indachi / D-760	Unit	3	5	Cukup	3	0	0	
28	Meubeleur lainnya Rakuda / kursi tangan	Unit	1	5	Kurang	0	0	1	
29	A.C. Split	Unit	29	25	Cukup	25	0	4	
30	Kipas Angin	Unit	6	10	Cukup	5	0	1	
31	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Unit	2	5	Cukup	0	0	2	
32	Loudspeaker BMB	Unit	1	2	Cukup	0	0	1	
33	Compact Disc	Unit	2	5	Kurang	0	0	2	
34	Megaphone	Unit	2	3	Kurang	2	0	0	
35	Microphone	Unit	15	20	Kurang	13	0	2	
36	Microphone Table Stand	Unit	6	20	Kurang	6	0	0	
37	Unit Power Supply	Unit	34		Kurang	34	0	0	
38	Camera Video	Unit	6	10	Cukup	6	0	0	
39	Dispenser	Unit	2	8	Kurang	2	0	0	
40	Handy Cam	Unit	2	5	Kurang	2	0	0	
41	Alat Rumah Tangga Lain-lain/Property Box Beroda	Unit	2	2	Cukup	2	0	0	
42	Alat Pemadam/Portable	Unit	3	10	Kurang	3	0	0	
43	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Unit	13	15	Kurang	13	0	0	
44	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	12	20	Kurang	12	0	0	
45	Audio Amplifier	Unit	2	5	Kurang	2	0	0	
46	Compact Disc Player	Unit	1	-	Kurang	0	0	1	
47	Modulation Monitor Speaker Kabaret	Unit	8	12	Kurang	3	0	5	
48	Microphone/Wireless s MIC	Unit	14	14	Cukup	14	0	0	
49	Audio Master Control Unit	Unit	2	3	Cukup	2	0	0	

No	Jenis Barang	Satuan	Jumlah yang ada	Jumlah Ideal	Kurang/ Cukup	Kondisi Baik	Kondisi Rusak Ringan	Kondisi Rusak Berat	Ket
50	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Unit	13	43	Kurang	11	1	1	
51	Peralatan studio audio lainnya (dst) Samsung / Video Wall	Unit	6	21	Kurang	6	0	0	
52	Video Monitor Panel Videotron	Unit	13	36	Kurang	13	0	0	
53	Power Supply (Peralatan Studio Video Dan Film)	Unit	2	6	Kurang	0	0	2	
54	Layar Film/Projector	Unit	3	5	Kurang	3	0	0	
55	Camera Digital	Unit	3	8	Kurang	3	0	0	
56	Camera Conference	Unit	3	5	Kurang	3	0	0	
57	4K HDMI VIDEO CAPTURE	Unit	2	4	Kurang	2	0	0	
58	Holyland / Mars 300 Wireless video transmitter	Unit	2	6	Kurang	2	0	0	
59	Gimbal Axis Camera	Unit	2	10	Kurang	2	0	0	
60	LED 500 / Video Light	Unit	2	6	Kurang	2	0	0	
61	SANDISK / EXTREME PRO MICROSDXC UHS-I CLASS 10 64GB	Unit	2	10	Kurang	2	0	0	
62	WEIFENG Light Weight Tripod WT-3560 Black	Unit	3	6	Kurang	3	0	0	
63	Gorila pod	Unit	3	4	Cukup	3	0	0	
64	Headphone	Unit	4	10	Kurang	4	0	0	
65	Pesawat Telephone	Unit	11		Cukup		0	11	
66	Telephone Mobile/ Smartphone Samsung	Unit	3	3	Cukup	3	0	0	
67	Handy Talky (HT)	Unit	7	20	Kurang	7	0	0	
68	Facsimile	Unit	6	10	Kurang	2	0	4	
69	Unit Tranceiver Ssb Portable	Unit	5			3	0	2	
70	Alat komunikasi radio hf/fm lainnya (dst) Tambahan kapasitas radio RSPKB	Unit	1	3	Kurang		0	1	
71	Alat komunikasi radio hf/fm lainnya (dst) Pesawat RIG	Unit	2	5	Kurang		0	2	
72	DJI / DRONE	Unit	2	4	Kurang	2	0	0	
73	Wifi Modem USB	Unit	48	50	Cukup	47	0	1	
74	P.C Unit	Unit	40	45	Kurang	38	0	2	
75	Lap Top	Unit	16	20	Kurang	16	0	0	
76	Plotter HP / Designjet T1300	Unit	1			1	0	0	

No	Jenis Barang	Satuan	Jumlah yang ada	Jumlah Ideal	Kurang/ Cukup	Kondisi Baik	Kondisi Rusak Ringan	Kondisi Rusak Berat	Ket
77	IP Camera	Unit	3	20	Kurang	3	0	0	
78	Surge Pro	Unit	2	4	Cukup	2	0	0	
79	Monitor	Unit	36	45	Kurang	36	0	0	
80	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Unit	5	20	Kurang	3	0	2	
81	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Unit	9	10	Cukup	9	0	0	
82	Server	Unit	8	10	Kurang	8	0	0	
83	Router	Unit	3	5	Kurang	2	0	1	
84	Kabel Fiber Optik Aerial SM 12 Core	Unit	2	2	Cukup	2	0	0	
85	ODC 96 Core	Unit	2	2	Cukup	2	0	0	
86	ONT/ONU / 8 Port LAN, 2 Port Voip	Unit	2	2	Cukup	2	0	0	
87	Pipa Galvanis	Unit	4	10	Kurang	4	0	0	
88	Mikrotik / RB 450 G	Unit	10	15	Kurang	10	0	0	
89	ODP Solid 8 Port with Passive Splitter 1:4	Unit	2	6	Kurang	2	0	0	
90	Kabel DW DC 1 Core	Unit	24	45	Kurang	24	0	0	
91	ONT / Up 1 ghz	Unit	80	100	Kurang	80	0	0	
92	Tiang Besi	Unit	2	10	Kurang	2	0	0	
93	Wallmount Plate / Untuk RB2011	Unit	2	15	Kurang	2	0	0	
94	Switch Hub / Unmanaged	Unit	5	10	Kurang	5	0	0	
95	Kabel Freecon Aerial 1 Core	Unit	80	100	Kurang	80	0	0	
96	Suspension Clamp	Unit	40	80	Kurang	40	0	0	
97	Dead End Clamp	Unit	80	100	Kurang	80	0	0	
98	Klamp Spiral	Unit	25	50	Kurang	25	0	0	
99	Stainless Steel Strap (Steelban)	Unit	240	350	Kurang	240	0	0	
100	Stoplink	Unit	100	200	Kurang	100	0	0	
101	Klem Hook Ulir	Unit	8	20	Kurang	8	0	0	
102	Tiang 9 Meter	Unit	5	20	Kurang	5	0	0	
103	Tiang 7 Meter	Unit	72	100	Kurang	72	0	0	
104	Fusion Splice Protection FO	Unit	2	5	Kurang	2	0	0	
105	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Unit	2	5	Kurang	2	0	0	

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024-2026 telah ditetapkan sejumlah sasaran pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian beserta target indikator kinerjanya, dimana pencapaiannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung
Berdasarkan Perubahan Indeks Kinerja Utama Tahun 2019 - 2023

No	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke (%)					Realisasi Capaian Tahun Ke (%)					Rasio Pencapaian tahun ke (%)					
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
I	Indikator Tujuan dan Sasaran																			
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)					3,26	3,4	3,6	3,8		3,26	3,24	3,6	n/a	-	100	95	100	100	n/a
2	Persentase Pelayanan Komunikasi dan Informatika yang Berkualitas				81.7 2	86.6	87	90	95	81.7 2	86.6 2	94.8 5	96,3 4	n/a	100	100	109	107		n/a
II	Indikator Program																			
1	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan						100	100	100			100	100	n/a			100	100		n/a
2	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah						75	75	75			75	70,8	n/a			100	94,4		n/a

No	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke (%)					Realisasi Capaian Tahun Ke (%)					Rasio Pencapaian tahun ke (%)				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
3	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah						100	100	100				100	n/a			100	100	n/a
4	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur						100	100	100				100	n/a			100	100	n/a
5	Persentase Diseminasi Informasi Kebijakan yang Didiseminasikan						80	100	100				100	n/a			125	100	n/a
6	Persentase Terintegrasinya Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Birokrasi						80	100	100				96.8 7	n/a			121	100	n/a
7	Persentase Pemanfaatan Data Statistik Daerah						80	90	90				100	n/a			125	111	n/a
8	Tingkat Kematangan Keamanan Informasi						Level II	Level II	Level II+				Level II	n/a			100	100	n/a

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung
(Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

No	Uraian	Anggaran Tahun 2018-2023				Realisasi Anggaran Tahun 2018-2023				Rasio antara realisasi dan anggaran (%)				Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan			4,688,334,400	5,125,860,800	5,126,000,000			4,509,902,004	4,739,835,042	n/a				
2	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah			75,000,000	67,500,000	67,500,000			14,420,202	52,135,396	n/a				
3	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah			669,066,963	635,884,035	657,400,000			556,420,577	663,102,865	n/a				
4	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur			201,207,380	205,180,000	224,500,000			156,714,257	124,277,730	n/a				
5	Persentase Diseminasi Informasi Kebijakan yang			673,594,970	464,843,685	450,715,000			497,090,127	377,891,339	n/a				

No	Uraian	Anggaran Tahun 2018-2023					Realisasi Anggaran Tahun 2018-2023					Rasio antara realisasi dan anggaran (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
	Didiseminasikan																	
6	Persentase Terintegrasinya Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Birokrasi			2,177,576,240	2,090,996,420	2,287,765,000								98.28	127	n/a		
7	Persentase Pemanfaatan Data Statistik Daerah			227,263,770	287,486,940	362,486,940								88.14	97.05	n/a		
8	Tingkat Kematangan Keamanan Informasi			186,672,770	138,926,540	138,927,060								91.60	98,9	n/a		

Dari penjelasan Tabel 2.6 diatas, pencapaian kinerja pelayanan yang didapatkan antara target dan realisasi adalah sebagai berikut :

- Indikator **Nilai Survey Kepuasan Masyarakat** dari target yang ditetapkan sebesar **3,6** capaian kinerjanya sebesar **3,604** diperoleh dari hasil survey melalui kuesioner dengan jumlah responden sebanyak 394 orang. Berdasarkan hasil SKM, diperoleh kinerja unit pelayanan menyandang nilai **“Sangat Baik”** dengan mutu pelayanan mendapatkan **“A”** dan mengalami kenaikan yang cukup besar dibandingkan dengan tahun 2021. Adapun faktor pendorong tercapainya indikator Nilai SKM ini adalah manajemen sumber daya manusia, pengawasan yang ketat, dan koordinasi serta kerjasama yang baik.
- **Persentase Pelayanan Komunikasi dan Informatika yang Berkualitas** telah mencapai target, dari target yang ditetapkan sebesar **90%** capaian kinerjanya sebesar **96,34%**. Pencapaian ini diperoleh dari formulasi hitungan komponen IKU, dengan capaian kinerja 35% dari terintegrasinya sistem informasi, 35% dari diseminasi informasi, 20% dari pemanfaatan data dan 6,23% dari agregat nilai pelaksanaan kontrol pengamanan informasi dengan menggunakan instrumen yang diterapkan BSSN. Adapun faktor pendorong tercapainya indikator Persentase pelayanan komunikasi dan informatika yang berkualitas adalah kebijakan pimpinan, manajemen sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung dan koordinasi serta kerjasama yang baik.

2.3.2. Capaian Kinerja Program

Capaian kinerja program diukur dengan indikator kinerja program. Indikator kinerja program dapat diukur dengan membuat kegiatan-kegiatan yang relevan terhadap usaha pencapaian program yang ingin dicapai, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan pun bisa diukur dengan membuat indikator kinerja kegiatan. Dengan uraian penjabarannya sebagai berikut:

a. Program Informasi dan Komunikasi Publik

Indikator Program Informasi dan Komunikasi Publik adalah Persentase diseminasi informasi kebijakan yang didiseminasikan. Diseminasi Informasi diukur dengan membandingkan antara jumlah media diseminasi yang aktif dengan jumlah media diseminasi yang dimiliki. Target kinerja pada tahun 2022 sebesar 100%. Pada Tahun 2022, Diseminasi Informasi yang terealisasi sebesar 100% atau mencapai 100% dari target Tahun 2022.

Diseminasi informasi publik diselenggarakan melalui 5 media yang aktif. Adapun lima media diseminasi tersebut terdiri dari :

- **Media website**, saat ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung mengelola tiga website antara lain :

Tabel 2.8

**Daftar Media Website yang Dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Belitung Tahun 2022**

Alamat / Url	Keterangan
1. https://kominfo.belitung.go.id/	Website Dinas Kominfo
2. https://portal.belitung.go.id/	Website Pemkab Belitung
3. https://mediacenter.belitung.go.id/	Website Media Center Dinas Kominfo

- **Media sosial**, maraknya penggunaan media sosial saat ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung menggunakan beberapa media sosial yang dijadikan sebagai sarana penyampaian diseminasi informasi kepada masyarakat, antara lain :

Tabel 2.9

**Daftar Media Sosial yang Dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Belitung Tahun 2022**

Jenis Media Sosial	Alamat / Url
Facebook	https://www.facebook.com/kominfobelitung/
Instagram	https://www.instagram.com/kominfobelitung/
Twiter	https://twitter.com/kominfobelitung/
Youtube	https://www.youtube.com/channel/
Tiktok	Kominfo Belitung

- **Media penyiaran radio**, penyelenggaraan diseminasi ini dilakukan melalui kegiatan Pengelolaan Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL). Sampai saat ini banyak kegiatan yang telah dilaksanakan di LPPL Radio Suara Praja dengan berkerjasama dengan berbagai pihak terkait sebagai bentuk penyampaian informasi ke masyarakat, diantaranya :

Tabel 2.10

**Daftar Talkshow di LPPL Radio Suara Praja
Tahun 2022**

No.	Nama Instansi	Pembicara	Topik
1	Polres Belitung	Kasatlantas	Sosialisasi Razia Menumbing

No.	Nama Instansi	Pembicara	Topik
2	Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung	Agung Rachmadi (Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung)	Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi 2022
3	Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung	Merry dan Tanti (Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung)	Makanan Pengganti Air Susu Ibu (MPASI)
4	Gemawira	Istanty (Pengurus Gemawira Belitung)	Wirausaha Bisa Naik Kelas
5	UKM Sereah	Vidy (owner)	Program Ruang Usaha
6	UKM Jeruk Kunci Rizky	Rizky (owner)	Program Ruang Usaha
7	UKM Keripik Tempe	Rahayu (owner)	Program Ruang Usaha
8	UKM Ziandra Aneka Olahan Buah	Tri (owner)	Program Ruang Usaha
9	UKM Sambal Vava	Ita (owner)	Program Ruang Usaha
10	UKM D2	Sofi (owner)	Program Ruang Usaha
11	UKM Sambal Lingkong Adiba	Mona (owner)	Program Ruang Usaha

- **Media luar ruang**, untuk pelaksanaan diseminasi media luar ruangan dilaksanakan melalui pemasangan spanduk yang berisikan informasi terkait Covid-19, dan himbauan protokol 4M melalui pengeras suara di kawasan bundaran satam. Media luar ruang dengan materi protokol kesehatan juga disampaikan dengan menggandeng 6 KIM yang ada di beberapa Kecamatan.
- **Media komunikasi tatap muka**, diselenggarakan melalui 2 kegiatan yaitu diseminasi informasi melalui media tradisional dan kegiatan pengembangan dan pembinaan KIM. Kegiatan diseminasi informasi melalui media tradisional yang dilaksanakan di 5 kecamatan, mulai dari Badau, Membalong, Sijuk, Selat Nasik, dan Tanjungpandan. Kegiatan pengembangan dan pembinaan kelompok informasi masyarakat telah dilakukan di KIM Pelita Damai, KIM Tanjung Lancor, KIM Mendanau, KIM Berita Parit, KIM Sepakat Kembiri, KIM Gurok Geraye, serta melakukan inisiasi pembentukan KIM di Desa Seliu. Salah satu kunjungan KIM Gurok Geraye di Desa Badau dilampirkan dengan dokumentasi:



b. Program Aplikasi Informatika

Indikator Program Aplikasi Informatika adalah Persentase terintegrasinya sistem informasi pelayanan publik dan birokrasi. Terintegrasinya sistem informasi diukur dengan perbandingan antara Jumlah sistem informasi yang terintegrasi sebanyak 46 sistem dengan Jumlah sistem informasi yang harus terintegrasi sesuai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang ada sebanyak 46 sistem. Target kinerja pada tahun 2022 sebesar 100%.

Pada Tahun 2022, terintegrasinya sistem informasi yang terealisasi sebesar 100% atau mencapai 100% dari target tahun 2022.

Tabel 2.11
Daftar Sistem Informasi yang telah terintegrasi Tahun 2022

NO	SISTEM INFORMASI	SUB DOMAIN	STATUS	TERINTEGRASI	OPD PENGAMPU
I	LAYANAN PUBLIK				
1	Layanan Cloud Kabupaten Belitung	https://cloud.belitung.go.id	1	1	Diskominfo
2	Portal Aplikasi Kabupaten Belitung	https://aplikasi.belitung.go.id	1	1	Diskominfo
3	Media Center Kabupaten Belitung	https://mediacenter.belitung.go.id	1	1	Diskominfo
4	Sistem Informasi Pelayanan Masyarakat	https://sipmas.belitung.go.id	1	1	Diskominfo
5	Belitung Saluran Aspirasi dan Pengaduan	https://besadu.belitung.go.id	1	1	Diskominfo
6	Layanan pendaftaran online (Simino)	https://rsud-marsidijudono.belitung.go.id/pendaftaran-online	1	1	RSUD dr. H. Marsidi Judono
7	Perijinan Terpadu Satu Pintu	https://dpmptspp.belitung.go.id	1	1	DPMPSTPP

NO	SISTEM INFORMASI	SUB DOMAIN	STATUS	TERINTEGRASI	OPD PENGAMPU
8	Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan	https://bekawan.belitung.go.id	1	1	Disdukcapil
9	Sistem Informasi Bantuan Sosial Kemanusiaan	https://begalor.belitung.go.id/	1	1	DSPPA
10	Penerimaan Peserta Didik Baru	https://ppdb.belitung.go.id/	1	1	Dinas Dikbud
11	Sistem Pemantauan Kualitas Air Online	http://siabel.belitungkab.go.id	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
12	Pelayanan Digital Laboratorium Lingkungan	https://petaling.belitung.go.id/	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
13	Besadu Rakyat Seputar Lingkungan	https://berasan.belitung.go.id	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
14	Aplikasi Persetujuan Lingkungan secara Online	https://pelilean.belitung.go.id/	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
15	Survey Kepuasan Masyarakat	http://skm.belitung.go.id	1	1	Diskominfo
16	Sistem Informasi Rapat	https://sirapat.belitung.go.id/	1	1	Diskominfo
17	Belitung Smart City	Android	1	1	Diskominfo
II.	ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN UMUM				
1	Belitung Satu Data	https://data.belitung.go.id	1	1	Diskominfo
2	Aplikasi Data Terkini	https://adat.belitung.go.id	1	1	Diskominfo
3	Whistle Blowing System	http://wbs.belitung.go.id	1	1	Inspektorat
4	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Belitung	http://flaj.belitung.go.id	1	1	Dishub
5	e-office Kabupaten Belitung	https://srikandi.arsip.go.id/	1	1	DPKD
6	Sistem Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik	http://lpse.belitung.go.id/	1	1	Bagian PBJ Setda
7	Sistem Informasi Pelaporan Dan Evaluasi Program Pembangunan	http://sipelempang.belitung.go.id/	1	1	Bagian Administrasi Pembangunan DPMKBPM
8	Sistem Informasi Keuangan Desa	https://siskeudes.belitung.go.id	1	1	DPMKBPM
9	Sistem Informasi Pengawasan Keuangan Desa	https://siswaskeudes.belitung.go.id	1	1	Inspektorat

NO	SISTEM INFORMASI	SUB DOMAIN	STATUS	TERINTEGRASI	OPD PENGAMPU
10	Sistem Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah Belitung	https://simpai.belitung.go.id/	1	1	Bappeda
11	Sistem Informasi Tukang Berkarya	https://sikaya.belitung.go.id/	1	1	DPUPR
12	Sistem Utilitas Pengelolaan Aik Kite	https://sugak.belitung.go.id/	1	1	DPUPR
III.	ADMINISTRASI LEGISLASI				
1	JDIH Kabupaten Belitung	http://jdih.belitung.go.id	1	1	Bagian Hukum
2	JDIH DPRD Kabupaten Belitung	http://jdih.dprd.belitung.go.id	1	1	Setwan
IV.	MANAJEMEN PEMBANGUNAN				
1	e-Planning	https://sipd.kemendagri.go.id	1	1	Bappeda
V.	SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH				
1	Simda BMD	Sistem Informasi Aset dan Barang Daerah	1	1	BPKAD
2	Simda Keuangan	Sistem Informasi Keuangan	1	1	BPKAD
3	Sim Gaji	Sistem Informasi Gaji	1	1	BPKAD
4	Simda Pendapatan	Sistem Informasi Pendapatan	1	1	BPPRD
VI.	MANAJEMEN KEPEGAWAIAN				
1	SIMPEG	http://simpeg.belitung.go.id	1	1	BKPSDM
2	e-SKP	http://skp.belitung.go.id	1	1	BKPSDM
3	e-Absensi PNS	http://e-kinerja.belitung.go.id/absen	1	1	BKPSDM
4	e-TPP PNS	https://e-kinerja.belitung.go.id/tpp/v3/	1	1	BKPSDM
5	e-Arsip	http://earsip.belitung.go.id	1	1	BKPSDM
6	e-SIDAK	https://aktivitas.belitung.go.id/v2/	1	1	BKPSDM

NO	SISTEM INFORMASI	SUB DOMAIN	STATUS	TERINTEGRASI	OPD PENGAMPU
7	e-Absensi Non PNS	https://e-kinerja.belitung.go.id/absen/nonpns/	1	1	BKPSDM
8	e-TPP PPPK	https://e-kinerja.belitung.go.id/tpp/pppk/	1	1	BKPSDM
9	e-Lapkin	https://e-kinerja.belitung.go.id/lapkin/	1	1	BKPSDM
10	e-KGB	http://kgb.belitung.go.id	1	1	BKPSDM
JUMLAH			46	46	

c. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Indikator Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral adalah Persentase pemanfaatan data statistik daerah. Pemanfaatan data diukur dengan membandingkan jumlah data yang dimanfaatkan untuk pembangunan daerah dengan jumlah data yang tersedia. Target kinerja pada tahun 2022 adalah 90%. Pada tahun 2022, Pemanfaatan Data yang terealisasi sebesar 100% atau mencapai 111% dari target tahun 2022.

Pemanfaatan data yang terealisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 sebesar 100% diperoleh dari 502 jenis data yang tersedia melalui Portal Belitung Satu Data dan seluruh data tersebut telah termanfaatkan seluruhnya. Adapun jenis data yang tersedia terlampir.

Tabel 2.12
Daftar Pemanfaatan Data Portal Belitung Satu Data
Tahun 2022

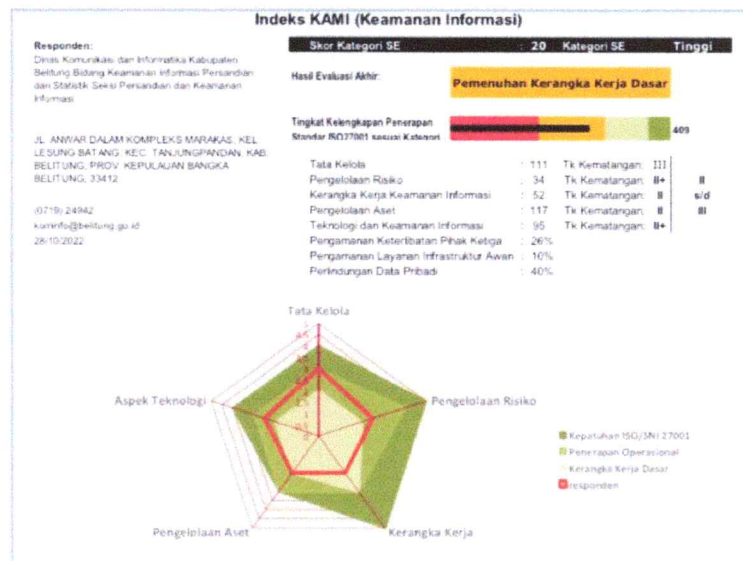
NO	NAMA DINAS	JUMLAH DATASET
1	Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung	1
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung	11
3	Inspektorat Kabupaten Belitung	1
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung	10
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung	12
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung	31
7	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung	5

NO	NAMA DINAS	JUMLAH DATASET
8	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung	0
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung	12
10	Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung	33
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung	64
12	Dinas Perikanan Kabupaten Belitung	25
13	Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Belitung	11
14	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung	9
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung	29
16	Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung	24
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung	12
18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung	3
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Belitung	18
20	Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung	14
21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung	43
22	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belitung	12
23	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung	15
24	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung	24
25	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Belitung	8
26	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung	0
27	UPT. RSUD H. Marsidi Judono	2
28	Kecamatan Tanjungpandan	3
29	Kecamatan Membalong	16
30	Kecamatan Sijuk	12
31	Kecamatan Badau	10
32	Kecamatan Selat Nasik	2
33	Instansi Vertikal	30
TOTAL		502

d. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Indikator Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi adalah Tingkat kematangan keamanan informasi. Penilaian Tingkat Kematangan Informasi ini diukur dengan Assesment Indeks KAMI (Keamanan Informasi) dari Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN). Target kinerja pada tahun 2022 adalah Level II.

Pada Tahun 2022, Tingkat Kematangan Keamanan Informasi yang diperoleh dari Assesment Indeks KAMI (Keamanan Informasi) yakni Level II atau mencapai 70,4% dari target tahun 2022.



Gambar 2.1 Hasil Validasi Penilaian Indeks KAMI Tahun 2022

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2022 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut di atas antara lain yaitu :

1. Melakukan perjanjian kerjasama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tentang pemanfaatan sertifikat elektronik pada sistem elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.
2. Menyusun Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.
3. Melaksanakan pendaftaran dan aktivasi sertifikat elektronik di pimpinan Pemerintah Kabupaten Belitung dan melaksanakan *ceremony* penggunaan tanda tangan elektronik pimpinan sekaligus sosialisasi pemanfaatan sertifikat elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.
4. Melaksanakan literasi keamanan informasi ke 5 (Lima) Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) se Kabupaten Belitung.

5. Melaksanakan Penilaian Mandiri (*Self Assesment*) Indeks Keamanan Informasi (KAMI) dan mengundang Asesor Indeks KAMI dari BSSN untuk validasi penilaian mandiri yang telah dilaksanakan.

2. 4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan kinerja pelayanan yang disampaikan pada sub bab sebelumnya, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung berdasarkan tugas pokok dan fungsi utamanya berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung dibentuk dalam rangka komitmen Pemerintah Kabupaten Belitung melaksanakan urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Belitung. Dalam perkembangannya terdapat tantangan dan peluang yang dapat dijadikan dasar untuk peningkatan pelayanan komunikasi dan informatika.

Tantangan sekaligus peluang dalam pembangunan komunikasi dan informatika muncul dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memuat tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang dilaksanakan dengan tujuan untuk :

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

1. Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
2. Setiap Orang berhak :
 - a) Melihat dan mengetahui informasi publik;

- b) Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik;
 - c) Mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/ atau
 - d) Menyebarkan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut.

Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditemukan peluang dan tantangan pelayanan komunikasi dan informatika sebagai berikut:

▪ **Tantangan :**

- 1. Keterbukaan Informasi Publik
- 2. Pemerataan Infrastruktur TIK
- 3. Ketersediaan Satu Data
- 4. Keamanan Informasi Digital Pemerintah Daerah
- 5. Aparatur dan masyarakat yang melek terhadap TIK

▪ **Peluang :**

- 1. Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan
- 2. Kebijakan Nasional tentang TIK
- 3. Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi
- 4. Pesatnya perkembangan TIK

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Bupati Belitung nomor 56 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung merupakan pengampu urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam memberikan pelayanan senantiasa mampu menyesuaikan dengan lingkungan internal maupun eksternal dan aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan merupakan bagian dari perencanaan yang tidak boleh diabaikan.

Permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung yang teridentifikasi berdasarkan permasalahan yang dihadapi dapat ditinjau dari tiga urusan, yaitu urusan pemerintahan komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik, diantaranya :

- a. Belum optimalnya Penyelenggaraan SPBE.
- b. Pengelolaan Keamanan Informasi belum optimal.
- c. Belum optimalnya Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik.
- d. Belum optimalnya Data Statistik Sektor.

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Diskominfo

Pokok masalah	Masalah	Akar masalah
Belum optimalnya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Informasi dan Komunikasi Publik,	Belum optimalnya Penyelenggaraan SPBE	1. Belum tersedia infrastruktur TIK yang memadai 2. Belum terintegrasinya Sistem Berbasis Elektronik

Pokok masalah	Masalah	Akar masalah
Persandian dan Statistik Sektoral		3. Belum optimalnya Kompetensi SDM di bidang Teknologi Informasi
	Belum optimalnya Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik	1. Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik masih kurang efektif 2. Diseminasi informasi publik belum optimal 3. Belum optimalnya Kompetensi SDM di bidang informasi dan komunikasi publik
	Belum optimalnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral	1. Belum optimalnya kinerja produsen data dan ketersediaan data yang akurat 2. Belum optimalnya infrastruktur penyelenggaraan statistik sektoral 3. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM di bidang Statistik Sektoral
	Pengelolaan Keamanan Informasi belum optimal	1. Belum tersedia infrastruktur Keamanan Informasi yang memadai 2. Belum optimalnya regulasi terkait Keamanan Informasi 3. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM di bidang Keamanan Informasi

3.2. TELAAHAN TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024-2026

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung sesuai dengan tugas dan fungsinya berperan dalam mencapai tujuan pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen RPD Tahun 2024-2026 dengan **tujuan RPD yaitu “Terwujudnya pelayanan birokrasi yg bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan”** dengan **sasaran RPD yaitu “Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel”** melalui strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

TUJUAN RPD	SASARAN RPD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya pelayanan birokrasi yg bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	Terciptanya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	Meningkatkan pengelolaan SPBE	Meningkatkan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi Meningkatkan keamanan informasi
Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi	Indikator : Nilai SAKIP Kabupaten Belitung	Meningkatkan statistik sektoral	Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan data statistik sektoral
		Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Peningkatan pengelolaan aspirasi dan pengaduan masyarakat
			Peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan kemitraan

Terdapat faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Belitung 2024-2026 yaitu:

a. Faktor penghambat

- Masih rendahnya komitmen Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan SPBE;
- Keterbatasan kapasitas sumber daya pada bidang persandian;

- Belum optimalnya sumber data dan informasi sebagai bahan pendukung perencanaan pembangunan daerah.

b. Faktor pendorong

- Perkembangan TIK yang semakin canggih mendorong Pemerintah Daerah untuk terus berinovasi;
- Pengembangan aplikasi sesuai kebutuhan OPD dan masyarakat;
- Penyebaran informasi publik yang terkini;
- Ketersediaan media dan saluran komunikasi.

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

➤ TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2020—2024, mengacu kepada visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020—2024, yaitu **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**. Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah visi institusi yang digunakan sebagai arahan kepada semua jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Rumusan itu disusun untuk mendukung tercapainya visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025.

Untuk itu, seluruh sektor pembangunan dalam pemerintahan dan seluruh potensi bangsa wajib mewujudkan visi tersebut. Khusus Kementerian Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat memberikan kontribusi melalui upaya mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, mandiri, dan berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan TIK.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut melalui 9 misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian Bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada warga; dan
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; serta
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan tujuh agenda prioritas yang dituangkan kedalam RPJMN Tahun 2020—2024.

Dari tujuh agenda prioritas nasional tersebut, sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika memfokuskan mendukung pencapaian target dua prioritas nasional. Dua prioritas nasional tersebut adalah PN-5 dan PN-7, khususnya mendukung Program Prioritas Nasional Infrastruktur Perkotaan, Transformasi Digital, serta Konsolidasi Demokrasi.

PN-5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

PN-7: Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020-2024 yaitu:

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
3. Meningkatnya konektivitas layanan pos;
4. Terwujudnya konektivitas *Next Generation Broadband* Nasional;
5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;
7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan sasaran strategis Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika di atas, maka faktor-faktor penghambat dan pendorong berdasarkan pelayanan Diskominfo Kabupaten Belitung adalah:

Adapun faktor penghambat terhadap pelayanan pada Diskominfo Kabupaten Belitung sama halnya dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu:

- Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dalam hal pengembangan e-government;
- Belum optimalnya rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian yang ditindaklanjuti.

Faktor pendorong berdasarkan hasil telaah renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, dan peraturan

pendukung lainnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Diskominfo secara ideal.

➤ **TELAAHAN RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung dalam pencapaian indikator kinerja yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten.

Tujuan Renstra Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Peningkatan Tata Kelola Berbasis Elektronik.

Sasaran Renstra Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu:

1. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pemerintah provinsi untuk pelayanan administrasi pemerintahan dan publik yang terintegrasi;
2. Termanfaatkannya data dan informasi statistik sektoral;
3. Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE.

Berdasarkan tujuan dan sasaran Renstra Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka faktor-faktor penghambat dan pendorong fungsi pelayanan Diskominfo Kabupaten Belitung adalah:

a. **Faktor Penghambat**

- Keterbatasan kapasitas sumber daya dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi;
- Belum optimalnya sumber data dan informasi sebagai bahan pendukung perencanaan pembangunan daerah.

b. **Faktor Pendorong**

- Perkembangan TIK yang semakin canggih mendorong Pemerintah Daerah untuk terus berinovasi;
- Komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien melalui SPBE.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014 – 2024 diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) dan Pasal 78 ayat (4) huruf c Undang-Undang

Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Dalam rangka memberikan dan meningkatkan pelayanan sektor komunikasi dan informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung berupaya untuk memaksimalkan pemanfaatan tata ruang wilayah serta mempertimbangkan dampak pembangunan dan pengembangan terhadap lingkungan hidup serta pembangunan dan pengembangan sektor komunikasi dan informatika diupayakan agar tetap ramah lingkungan.

Pemanfaatan jaringan optik secara optimal merupakan perwujudan pengembangan sistem prasarana telekomunikasi melalui pemanfaatan jaringan optik secara optimal, secara geografis wilayah Kabupaten Belitung dilintasi jaringan telekomunikasi serat optik internasional. Pembangunan serat optik yang menghubungkan sarana prasarana pemerintahan dengan kawasan strategis lainnya memperhatikan kaidah dan pedoman Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung.

Berdasarkan telaahan RTRW Kabupaten Belitung, maka faktor-faktor penghambat dan pendorong fungsi pelayanan Diskominfo Kabupaten Belitung adalah:

- a. Faktor Penghambat, yakni :
 - Minimnya pemahaman terhadap dokumen RTRW;
 - Koordinasi lintas sektor kurang optimal.
- b. Faktor Pendorong
 - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2017 tentang RTRW;
 - Instrumen pengendalian dan evaluasi kebijakan kesesuaian dokumen perencanaan dengan RTRW.

3.5. ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BELITUNG

Penentuan isu strategis merupakan bagian yang penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah untuk mengidentifikasi kondisi yang akan berdampak kedepannya. Untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Analisa yang digunakan melalui metode coding dari berbagai aspek yaitu Infrastruktur TIK (SPBE), Diseminasi Infomasi, Data Statistik Sektoral, Persandian dan Sumber Daya Manusia yang sudah diolah dan dikomunikasikan melalui rapat internal Dinas Komunikasi dan Informatika serta dikoordinasikan dalam *Forum Group Discussion (FGD)*.

Berdasarkan hasil analisa tersebut, maka beberapa isu strategis pembangunan dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika untuk 3 (tiga) tahun kedepan adalah :

1. Pengembangan dan penguatan tata kelola dan infrastruktur Teknologi Informasi.
2. Pengembangan dan penguatan sarana dan prasarana diseminasi informasi secara lebih luas dan transparan serta pelibatan masyarakat.
3. Pengembangan Sistem Informasi penyediaan data yang terstruktur.
4. Pengembangan keamanan informasi.
5. Pengembangan dan Penguatan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Diskominfo yang sesuai kompetensinya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu sampai dengan 3 (tiga) tahun mendatang adalah ***Meningkatnya Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Elektronik***. Sedangkan sasaran yang ditetapkan adalah ***Terwujudnya Pelayanan Komunikasi dan Informatika yang Optimal dan Tersedianya Data Statistik Sektoral yang Berkualitas*** serta ***Terwujudnya Tata Kelola dan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Optimal***.

Tujuan, Sasaran, Indikator sasaran, dan target kinerja sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung dapat dilihat pada Tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTRA	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		
			TUJUAN/SASARAN		KE-		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Elektronik		Indeks Domain Layanan SPBE (Layanan publik dan administrasi pemerintahan)	n/a	3,3	3,4	3,5
		Terwujudnya Pelayanan Komunikasi dan Informatika yang optimal	Persentase Pelayanan Komunikasi dan Informatika yang optimal Formulasi : =0,5xa+0,5xb a. Terintegrasinya sistem informasi = (Jumlah sistem Informasi terintegrasi / jumlah sistem informasi yang harus terintegrasi sesuai SPBE) x 100% b. Diseminasi informasi = (Jumlah media diseminasi yang aktif / jumlah media diseminasi yang dimiliki) x 100%	96,34%	95%	95,5%	96%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTRA	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		
			TUJUAN/SASARAN		KE-		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Tersedianya Data Statistik Sektoral yang Berkualitas	Persentase Data Statistik Sektoral yang Berkualitas Rumusan : (Jumlah data yang memenuhi prinsip satu data/Jumlah data tersedia) x 100% Ket: Prinsip Satu Data berdasarkan Pasal 3 Perpres 39/2019	n/a	65%	70%	75%
		Terwujudnya Tata Kelola dan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Optimal	Tingkat Kematangan Keamanan Informasi Rumusan : (Jumlah Nilai per Area Keamanan Informasi/Jumlah Area Penilaian) x 100%	Level II+	60%	65%	70%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan.

Strategi dan arah kebijakan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPD Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Upaya pencapaian sasaran tersebut, kemudian dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan RPD	Terwujudnya Pelayanan Birokrasi yang Bersih, Inovatif, Profesional, Akuntabel dan Transparan				
Sasaran RPD	Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel				
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Elektronik	Indeks Domain Layanan SPBE (Layanan publik dan administrasi pemerintahan)	Terwujudnya Pelayanan Komunikasi dan Informatika yang Optimal	Persentase Pelayanan Komunikasi dan Informatika yang Optimal	Mengoptimalkan Penyelenggaraan SPBE	1. Meningkatkan Infrastruktur SPBE 2. Meningkatkan Aplikasi SPBE 3. Mengoptimalkan Keamanan SPBE 4. Meningkatkan Layanan SPBE 5. Mengoptimalkan Manajemen SPBE
				Mengoptimalkan Keterbukaan Informasi Publik	1. Penguatan Diseminasi Informasi Publik 2. Penguatan Pelayanan Informasi Publik 3. Penguatan kemitraan dan Komunikasi Sosial 4. Meningkatkan Kompetensi SDM di bidang informasi dan komunikasi publik 5. Menyusun dan menyiapkan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi 6. Melakukan monitoring dan evaluasi di bidang informasi dan komunikasi
		Tersedianya Data Statistik Sektoral yang Berkualitas	Persentase Data Statistik Sektoral yang Berkualitas	Meningkatkan Pengelolaan Data Statistik Sektoral	1. Menyediakan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan mudah diakses 2. Meningkatkan Kompetensi SDM di bidang statistik sektoral 3. Menyusun dan menyiapkan kebijakan di bidang statistik sektoral 4. Melakukan monitoring dan evaluasi di bidang statistik sektoral
		Terwujudnya Tata Kelola dan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Optimal	Tingkat Kematangan Keamanan Informasi	Meningkatkan Pengelolaan Persandian untuk Pengamanan Informasi	1. Meningkatkan layanan dan tata kelola keamanan informasi 2. Melakukan monitoring dan evaluasi dibidang keamanan informasi 3. Meningkatkan Kompetensi SDM di bidang persandian

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan rencana kegiatan serta pendanaan yang dituangkan Renstra Perangkat Daerah tahun 2024-2026 disusun dengan mengacu dan berpedoman pada RPD Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan dan sasaran. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana *strategic* yang diarahkan untuk mencapai tujuan sasaran serta dan misi dan visi pemerintah daerah.

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi. Berikut rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator program yaitu:

1. Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan sesuai Ketentuan.

Definisi operasional: (Jumlah dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan/jumlah dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan yang direncanakan) x 100%.

Dengan kegiatan sebagai berikut :

- a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, indikator kegiatan yaitu: Dokumen hasil perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah;
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, indikator kegiatan yaitu: Dokumen keuangan Perangkat Daerah.

2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat daerah

Definisi operasional: Sesuai perhitungan rumusan Peraturan Kepala BKN nomor 8 tahun 2019 tentang Indeks Profesionalitas ASN sesuai dengan form pengukuran indeks profesionalitas ASN.

Dengan kegiatan sebagai berikut :

- a) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, indikator kegiatan yaitu: Terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah.

3. Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah

Definisi operasional: Rata-rata capaian pelayanan administrasi perkantoran (dilihat dari capaian kinerja fisik dari tiap sub kegiatan/ total sub kegiatan) x 100%.

Dengan kegiatan sebagai berikut :

- a) Administrasi Umum Perangkat Daerah, indikator kegiatan yaitu: Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah;
- b) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, indikator kegiatan yaitu: Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.

4. Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Definisi operasional: Rata-rata capaian pemenuhan sarana prasarana aparatur (dilihat dari capaian kinerja fisik dari tiap sub kegiatan/ total sub kegiatan) x 100%.

Dengan kegiatan sebagai berikut :

- a) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, indikator kegiatan yaitu: Jenis barang milik daerah;
- b) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, indikator kegiatan yaitu: Barang milik daerah dalam kondisi baik.

B. Program Informasi Dan Komunikasi Publik, dengan indikator program yaitu: Persentase Diseminasi Informasi Kebijakan yang Didiseminasikan.

Definisi operasional: $(\text{Jumlah media diseminasi yang aktif} / \text{Jumlah media diseminasi yang dimiliki}) \times 100\%$.

Dengan kegiatan sebagai berikut :

- a) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, indikator kegiatan yaitu: Persentase Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang optimal.

C. Program Aplikasi Informatika, dengan indikator program yaitu: Persentase Terintegrasinya Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Birokrasi.

Definisi operasional: $(\text{Jumlah sistem Informasi terintegrasi} / \text{jumlah sistem informasi yang harus terintegrasi sesuai SPBE}) \times 100\%$.

Dengan kegiatan sebagai berikut :

- a) Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, indikator kegiatan yaitu: Persentase Layanan Nama Domain dan Sub Domain yang dikelola dengan baik;
- b) Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, indikator kegiatan yaitu: Persentase Layanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Belitung yang dikelola dengan baik.

D. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor, dengan indikator program yaitu: Persentase Perangkat Daerah (PD) yang Memanfaatkan Data Statistik Sektor. Definisi operasional: $(\text{Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan data statistik sektor} / \text{Jumlah Perangkat Daerah}) \times 100\%$.

Dengan kegiatan sebagai berikut :

- a) Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, indikator kegiatan yaitu: Data Statistik Sektor yang dipublikasikan.

E. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi, dengan indikator program yaitu: Persentase Perangkat Daerah (PD) yang Menggunakan Layanan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

Definisi operasional: $(\text{Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan Layanan Persandian untuk pengamanan Informasi} / \text{Jumlah Perangkat Daerah}) \times 100\%$.

Dengan kegiatan sebagai berikut :

- a) Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, indikator kegiatan yaitu: Persentase Terselenggaranya Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI).

Tabel 6.1a

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan

Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Belitong Berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1. Meningkatkan pelayanan administrasi pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Elektronik	1.1. Tervujudnya Pelayanan Komunikasi dan Informatika yang optimal	2 16 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Domain Layanan SPBE	n/a	3,3		3,4		3,5		3,5			
				Persentase Pelayanan Komunikasi dan Informatika yang optimal	96,34 %	95		95,5 %		96 %					
		2 16 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan	100 %	100	5.514.000,000	100 %	5.514.000,000	100 %	5.514.000,000	100 %	16.542.000,000		
				2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	70,8 %	75,44 %	119.000.000	75,44 %	119.000.000	75,44 %	119.000.000	75,44 %	357.000.000		
				3. Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100	882.091.000	100 %	797.091.000	100 %	797.091.000	100 %	2.476.273.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
				4. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100	1.083.000.000	100 %	294.000.000	100 %	299.000.000	100 %	1.676.000.000				
		2 16 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan	100 %	100	5.514.000.000	100 %	5.514.000.000	100 %	5.514.000.000	100 %	16.542.000.000				
		2 16 01 2.0 1	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran Dokumen Hasil Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dok	10	10.000.000	10 Dok	10.000.000	10 Dok	10.000.000	30 Dok	30.000.000				
				Hasil Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja sesuai peraturan	100 %	100		100 %				100 %					
		2 16 01 2.0 1 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	3	2.000.000,00	3 Dok	2.000.000,00	3 Dok	2.000.000,00	9 Dok	6.000.000	Sekretariat	Tg. Panda n		
		2 16 01 2.0 1 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Keluaran Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dok	1	1.500.000,00	1 Dok	1.500.000,00	1 Dok	1.500.000,00	3 Dok	4.500.000	Sekretariat	Tg. Panda n		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan		Data Capaian pada Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir)					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
					Dokumen RKA-SKPD													
		2 16 01 2,0 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Keluaran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	3	4.500.000	Sekretariat	Tg. Panda n		
		2 16 01 2,0 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Keluaran	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	3	4.500.000	Sekretariat	Tg. Panda n		
		2 16 01 2,0 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Keluaran	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	3	4.500.000	Sekretariat	Tg. Panda n		
		2 16 01 2,0 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	3	2.000.000,00	3	2.000.000,00	3	2.000.000,00	9	6.000.000	Sekretariat	Tg. Panda n		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
		2 16 01 2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran	3	3	5.504.000.000	3	5.504.000.000	3	5.504.000.000	9	16.512.000.000				
		Dok		Dok	Dok	Dok	Dok	Dok	Dok	Dok							
					Hasil	100	100		100		100		100				
				Terpenuhinya Dokumen Keuangan sesuai peraturan	%	%		%		%		%					
		2 16 01 2.0 2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran	33	38	5.500.000.000	38	5.500.000.000	38	5.500.000.000	38	16.500.000.000	Sekretariat		Tg. Panda n	
		2 16 01 2.0 2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Keluaran	Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	2.000.000	Orang/ Bulan	2.000.000	Orang/ Bulan	2.000.000	Orang/ Bulan	6.000.000	Sekretariat		Tg. Panda n	
		2 16 01 2.0 2		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	3					
		2 16 01 2.0 2	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Keluaran	2	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	6	6.000.000	Sekretariat		Tg. Panda n	
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dok	Dok		Dok		Dok		Dok					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
		2 16 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2 Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	70,8 %	75 %	119.000.000	75 %	119.000.000	75 %	119.000.000	75 %	357.000.000				
		2 16 01 2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keluaran	33	38	119.000.000	38	119.000.000	38	119.000.000	38	357.000.000				
				Hasil	Orang	Orang		Orang		Orang		Orang					
				Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	70,8 %	75 %		75 %		75 %		75 %					
		2 16 01 2,05	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan lainnya	Keluaran	1	1	19.000.000	1	19.000.000	1	19.000.000	3	57.000.000	Sekretariat		Tg. Panda n	
		2 16 01 2,05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Keluaran	5	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	Paket	300.000.000	Sekretariat		Tg. Panda n	
		2 16 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3. Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	565.000.000	100 %	480.000.000	100 %	480.000.000	100 %	1.525.000.000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi	
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
		2 16 01 2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Keluaran	100	100	565.000.000	100	480.000.000	100	480.000.000	100	1.525.000.000			
				Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	%	%	%	%	%	%					
				Hasil	100	100		100		100		100		100		
				Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	%	%	%	%	%	%	%					
		2 16 01 2.0 6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran	1	1	10.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	3	40.000.000	Sekretariat	Tg. Panda n	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket					
				Keluaran	2	2	50.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000	4	160.000.000	Sekretariat	Tg. Panda n	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket					
		2 16 01 2.0 6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Keluaran	1	1	10.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	3	40.000.000	Sekretariat	Tg. Panda n	
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket					
				Keluaran	2	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	9	450.000.000	Sekretariat	Tg. Panda n	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket	Paket					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2 16 01 2.0 05 6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	3	90.000.000	Sekretariat	Tg. Pandan
		2 16 01 2.0 06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Paket 1	1	15.000.000	Paket 1	15.000.000	Paket 1	15.000.000	Paket 3	45.000.000	Sekretariat	Tg. Pandan
		2 16 01 2.0 09 6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen 12	12	300.000.000	Dokumen 12	200.000.000	Dokumen 12	200.000.000	Dokumen 36	700.000.000	Sekretariat	Luar Daerah
		2 16 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	868.000.000	100 %	77.000.000	100 %	82.000.000	100 %	1.027.000.000		
		2 16 01 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Keluaran Jenis Barang Milik Daerah	n/a	6	868.000.000	4	77.000.000	4	82.000.000	14	1.027.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
			Pemerintah Daerah			Jenis		Jenis		Jenis		Jenis					
				Hasil	n/a	100		100		100		100					
		2 16 01 2,0 01 7	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran	n/a	%	420.000.000	%		%		%	420.000.000	Sekretariat	Tg. Panda n		
		2 16 01 2,0 02 7	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran	n/a	Unit	300.000.000					Unit	300.000.000	Sekretariat	Tg. Panda n		
		2 16 01 2,0 05 7	Pengadaan Mebel	Keluaran	n/a	Unit	8.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	Unit	8	Sekretariat	Tg. Panda n		
		2 16 01 2,0 06 7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran	n/a	Unit	140.000.000	Unit	75.000.000	5	80.000.000	Unit	16	Sekretariat	Tg. Panda n		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
		2 16 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3. Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %	317.091.000	100 %	317.091.000	100 %	317.091.000	100 %	951.273.000				
		2 16 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	317.091.000	100 %	317.091.000	100 %	317.091.000	100 %	951.273.000				
				Hasil Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %					
		2 16 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	1.200.000	12	1.200.000	12	1.200.000	36	3.600.000	Sekretariat	Tg. Panda n		
		2 16 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	36	450.000.000	Sekretariat	Tg. Panda n		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir)			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
							(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
		2 16 01 2.0 04 8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	165.891.000	12	165.891.000	12	165.891.000	36	497.673.000	Sekretariat	Tg. Panda n	
		2 16 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	100	215.000.000	100	217.000.000	100	217.000.000	100	649.000.000			
		2 16 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	3	3	215.000.000	3	217.000.000	3	217.000.000	3	649.000.000			
				Hasil Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	100		Jenis 100		Jenis 100		Jenis 100				
		2 16 01 2.0 9 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Keluaran Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	14	15	90.000.000	20	117.000.000	20	117.000.000	20	324.000.000	Sekretariat	Tg. Panda n	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Dinas Jabatan	dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit		Unit		Unit		Unit			
		2 16 01 2.0 06 9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	62	63	50.000.000	63	50.000.000	63	50.000.000	63	150.000.000	Sekretariat	Tg. Panda n
		2 16 01 2.0 09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Keluaran Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Unit	Unit		Unit		Unit		Unit			
		2 16 02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase diseminasi informasi kebijakan yang didiseminasikan	100	100	1.725.500.000	100	1.035.000.000	100	1.095.000.000	100	3.855.500.000		
		2 16 02 2.0 1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/K ota	Keluaran Persentase Layanan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah yang optimal	100	100	1.725.500.000	100	1.035.000.000	100	1.095.000.000	100	3.855.500.000		
				Hasil Terkelolanya informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten	%	%		%		%		%			
					100	100		100		100		100			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
					%	%		%		%		%					
		2 16 02 2.0 1 02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Keluaran Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12	13	60.000.000	13	65.000.000	13	70.000.000	39	195.000.000	Bid. IKP	Tg. Pandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik		
		2 16 02 2.0 1 05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Keluaran Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen 1	1	850.000.000	Dokumen 1	700.000.000	Dokumen 1	700.000.000	Dokumen 3	2.250.000.000	Bid. IKP	Tg. Pandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik		
		2 16 02 2.0 1 06	Pelayanan Informasi Publik	Keluaran Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen 1	1	65.500.000	Dokumen 1	70.000.000	Dokumen 1	75.000.000	Dokumen 3	210.500.000	Bid. IKP	Tg. Pandan, Luar Daerah		
		2 16 02 2.0 1 07	Layanan Hubungan Media	Keluaran Jumlah Layanan Hubungan Media	Dokumen 1	1	700.000.000	Layanan	125.000.000	Layanan	150.000.000	Layanan	975.000.000	Bid. IKP	Tg. Pandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik		
		2 16 02 2.0 1 08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Keluaran Jumlah Dokumen Kemitraan dengan	1	1	50.000.000	1	75.000.000	1	100.000.000	3	225.000.000	Bid. IKP	Tg. Pandan, Sijuk,		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
															Badau Memb along, Selat Nasik		
		2 16 03	Program Aplikasi Informatika	Persentase terintegrasi sistem informasi pelayanan publik dan birokrasi	100	97	5.846.000.000	98	5.285.000.000	99	5.730.800.000	99	16.861.800.000				
		2 16 03 2,01	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran Persentase Layanan Nama Domain dan Sub Domain yang dikelola dengan baik	100	100	2.556.000.000	100	2.556.000.000	100	2.556.000.000	100	7.668.000.000				
				Hasil Terkelolanya Nama Domain di Lingkup Pemerintah Kabupaten Belitung dan Pemerintah desa di Kabupaten Belitung	%	%		%		%		%					
					100	100		100		100		100					
					%	%		%		%		%					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir)			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
		2 16 03 2,0 01 1	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Keluaran Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	3	3	6.000.000	3	6.000.000	3	6.000.000	3	18.000.000	Bid. Aptika	Tg. Pandan	
		2 16 03 2,0 01 1	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Domai n n/a	Domai n 1	50.000.000	Domai n 1	50.000.000	Domai n 1	50.000.000	Domai n 3	150.000.000	Bid. Aptika	Tg. Pandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	
		2 16 03 2,0 01 1	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Keluaran Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit 40	Dok 40	2.500.000	Unit 40	2.500.000	Unit 40	2.500.000	Dok 40	7.500.000	Bid. Aptika	Tg. Pandan, Sijuk, Badau, Membalong, S.Nasik	
		2 16 03 2,0 02 2	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran Persentase Layanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten	100	100	3.290.000	100	2.729.000	100	3.174.800	100	9.193.800			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
					%	%		%		%		%					
				Hasil	100	100		100		100		100					
					%	%		%		%		%					
		2 16 03 2.0 01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran	1	1	20.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	3	75.000.000	Bid. Aptika	Tg. Pandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik		
		2 16 03 2.0 02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Keluaran	1	1	1.000.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	Dok	3	1.200.000.000	Bid. Aptika	Tg. Pandan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2 16 03 2.0 03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Keluaran Jumlah Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	2	2	850.000.000	2	900.000.000	2	1.000.000.000	2	2.750.000.000	Bid. Aptika	Tg. Panda n, Sijuk, Badau, Memb along, Selat Nasik
		2 16 03 2.0 04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintahan Daerah	Keluaran Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintahan Daerah	1	1	250.000.000	1	300.000.000	1	360.000.000	3	910.000.000	Bid. Aptika	Tg. Panda n, Sijuk, Badau, Memb along, Selat Nasik
		2 16 03 2.0 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Keluaran Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1	1	200.000.000	1	240.000.000	1	288.000.000	3	728.000.000	Bid. Aptika	Tg. Panda n, Sijuk, Badau, Memb along, Selat Nasik
		2 16 03 2.0 06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Keluaran Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	n/a	31	20.000.000	31	24.000.000	31	28.800.000	31	72.800.000	Bid. Aptika	Tg. Panda n, Sijuk, Badau, Memb along, Selat Nasik

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (e-d akhir)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Perangkat Daerah		Perangkat Daerah		Perangkat Daerah		Perangkat Daerah			
		2 16 03 2,0 07 2	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Keluaran Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	1	1	200.000.000	1	240.000.000	1	288.000.000	1	728.000.000	Bid. Aptika	Tg. Panda n, Sijuk, Badau, Memb along, Selat Nasik
		2 16 03 2,0 08 2	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan	Keluaran Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan Daerah	1	1	200.000.000	1	240.000.000	1	288.000.000	1	728.000.000	Bid. Aptika	Tg. Panda n, Sijuk, Badau, Memb along, Selat Nasik
		2 16 03 2,0 09 2	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Keluaran Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	n/a	1	300.000.000	1	360.000.000	1	432.000.000	3	1.092.000.000	Bid. Aptika	Tg. Panda n, Sijuk, Badau, Memb along, Selat Nasik
						Dok		Dok		Dok		Dok			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2 16 03 2.0 2 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Keluaran Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	n/a	1	200.000.000	1	240.000.000	1	288.000.000	3	728.000.000	Bid. Aptika	Tg. Panda n, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik
		2 16 03 2.0 2 11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Keluaran Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	n/a	1	50.000.000	1	60.000.000	1	72.000.000	3	182.000.000	Bid. Aptika	Tg. Panda n
1.1.2	Tersedianya data statistik sektoral yang berkualitas			Persentase data statistik sektoral yang berkualitas	n/a	65		70		75		75			
		2 20 02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang memanfaatkan data statistik sektoral	100	100	390.000.000	100	290.000.000	100	340.000.000	100	1.020.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
		2 20 02 2,0 1	Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran Data Statistik Sektor yang dipublikasikan Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektor	100 % 100 %	800 Data 100 %	390.000.000	1000 Data 100 %	290.000.000	1200 Data 100 %	340.000.000	100 % 100 %	1.020.000.000				
		2 20 02 2,0 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor	Keluaran Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor	3 40 Dok	3 40 Dok	260.000.000	3 Dok	235.000.000	3 Dok	235.000.000	9 Dok	730.000.000	Bid. KIPS	Tg. Pandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik		
		2 20 02 2,0 1	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Keluaran Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	40 Orang	40 Orang	50.000.000			40 Orang	50.000.000	80 Orang	100.000.000	Bid. KIPS	Tg. Pandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik		
		2 20 02 2,0 1	Membangun Metadata Statistik Sektor	Keluaran Jumlah Metadata Statistik Sektor yang Dihimpun	n/a	1 Dok	30.000.000	1 Dok	30.000.000	1 Dok	30.000.000	3 Dok	90.000.000	Bid. KIPS	Tg. Pandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2 20 02 2.0 1 04	Pengembangan Infrastruktur	Keluaran Jumlah Infrastruktur Statistik	n/a	2	50.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	4	100.000.000	Bid. KIPS	Tg. Panda n
1.1.3	Terdapatnya tata kelola dan layanan keamanan informasi Pemerintah Daerah yang optimal	2 21 02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi	Level II+	60	290.000.000	65	250.000.000	70	260.000.000	70	800.000.000		
						%	%	%	%	%	%				
						Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit				
		2 21 02 2.0 1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran Persentase Terselenggaranya Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) Hasil Peningkatan Komitmen,	100	80	265.000.000	80	220.000.000	90	225.000.000	90	710.000.000		
						80				90		90			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					%	%		%		%		%			
		2 21 02 2.0 01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran	n/a	1	120.000.000					1	120.000.000	Bid. KIPS	Tg. Panda n
		2 21 02 2.0 01	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1	35.000.000	1	105.000.000	1	110.000.000	3	250.000.000	Bid. KIPS	Tg. Panda n
		2 21 02 2.0 03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Keluaran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik	1	45.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	145.000.000	Bid. KIPS	Tg. Panda n

Tabel 6.1b

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan

Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Belitang Berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.1 Meningkatkan Layanan Administrasi pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Elektronik	1.1.1 Terwujudnya Pelayanan Publik dan Informatika yang optimal	21061	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kotora	Indeks Domain Layanan SPBE	n/a	3,3		3,4		3,5		3,5			
				Persentase Pelayanan Komunikasi dan Informatika yang optimal	96,34 %	95		95,5 %		96		96 %			
				1. Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan	100 %	100	5.514.000.000	100 %	5.514.000.000	100 %	5.514.000.000	100 %	16.542.000.000		
				2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	70,8 %	75,44	119.000.000	75,44 %	119.000.000	75,44 %	119.000.000	75,44 %	357.000.000		
				3. Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	100	882.091.000	100 %	797.091.000	100 %	797.091.000	100 %	2.476.273.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
				4. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	1.083.000.000	100 %	294.000.000	100 %	299.000.000	100 %	1.676.000.000				
		21061	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kotora	1. Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan	100 %	100 %	5.514.000.000	100 %	5.514.000.000	100 %	5.514.000.000	100 %	16.542.000.000				
		21062,01	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran Dokumen Hasil Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dok	10 Dok	10.000.000	10 Dok	10.000.000	10 Dok	10.000.000	30 Dok	30.000.000				
				Hasil Terpenuhiya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja sesuai peraturan	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %					
		21062,01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	3 Dok	2.000.000,00	3 Dok	2.000.000,00	3 Dok	2.000.000,00	9 Dok	6.000.000	Sekretariat	Tg. Pandan		
		21062,02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Keluaran Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	1.500.000,00	1 Dok	1.500.000,00	1 Dok	1.500.000,00	3 Dok	4.500.000	Sekretariat	Tg. Pandan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi	
						2024			2025			2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir)			
						Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			
		2102,0103	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	1.500.000,00	1 Dok	1.500.000,00	1 Dok	1.500.000,00	3 Dok	4.500.000	Sekretariat	Tg. Pandan			
		2102,0104	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	1.500.000,00	1 Dok	1.500.000,00	1 Dok	1.500.000,00	3 Dok	4.500.000	Sekretariat	Tg. Pandan			
		2102,0105	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	1.500.000,00	1 Dok	1.500.000,00	1 Dok	1.500.000,00	3 Dok	4.500.000	Sekretariat	Tg. Pandan			
		2102,0107	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Lap	3 Lap	2.000.000,00	3 Lap	2.000.000,00	3 Lap	2.000.000,00	9 Lap	6.000.000	Sekretariat	Tg. Pandan			
		2102,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	3 Dok	3 Dok	5.504.000,00	3 Dok	5.504.000,00	3 Dok	5.504.000,00	9 Dok	16.512.000,000					
				Hasil Terpenuhiya Dokumen Keuangan sesuai peraturan	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
		210201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/Bulan	38 Orang/Bulan	5.500.000.000	38 Orang/Bulan	5.500.000.000	38 Orang/Bulan	5.500.000.000	38 Orang/Bulan	16.500.000.000	Sekretariat	Tg. Pandan		
		210205	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Keluaran Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	1 Lap	2.000.000	1 Lap	2.000.000	1 Lap	2.000.000	3 Lap	6.000.000	Sekretariat	Tg. Pandan		
		210208	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Keluaran Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dok	2 Dok	2.000.000	2 Dok	2.000.000	2 Dok	2.000.000	6 Dok	6.000.000	Sekretariat	Tg. Pandan		
		2101	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	70,8 %	75 %	119.000.000	75 %	119.000.000	75 %	119.000.000	75 %	357.000.000				
		210205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keluaran Terpenuhiya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	33 Orang	38 Orang	119.000.000	38 Orang	119.000.000	38 Orang	119.000.000	38 Orang	357.000.000				
				Hasil Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	70,8 %	75 %		75 %		75 %		75 %					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir)					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
		2102,0502	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Keluaran	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	1	19.000.000	1	19.000.000	1	19.000.000	3	57.000.000	Sekretariat	Tg. Pandan		
		2102,0509	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Keluaran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	60	300.000.000	Sekretariat	Tg. Pandan		
		21061	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot	3. Persentase Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah		100	100	565.000.000	100	480.000.000	100	480.000.000	100	1.525.000.000				
		2102,0606	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Keluaran	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	565.000.000	100	480.000.000	100	480.000.000	100	1.525.000.000				
				Hasil	Persentase Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	100	100		100		100		100					
		2102,0601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	10.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	3	40.000.000	Sekretariat	Tg. Pandan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
		2 1 0 2, 6 1 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluhan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 2	2 50.000.000		1	55.000.000	1	55.000.000	4	160.000.000	Sekretariat	Tg. Pandan		
		2 1 0 2, 6 1 06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Keluhan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 1	10.000.000		1	15.000.000	1	15.000.000	3	40.000.000	Sekretariat	Tg. Pandan		
		2 1 0 2, 6 1 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluhan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 2	150.000.000		3	150.000.000	3	150.000.000	9	450.000.000	Sekretariat	Tg. Pandan		
		2 1 0 2, 6 1 06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluhan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 1	30.000.000		1	30.000.000	1	30.000.000	3	90.000.000	Sekretariat	Tg. Pandan		
		2 1 0 2, 6 1 06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluhan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 1	15.000.000		1	15.000.000	1	15.000.000	3	45.000.000	Sekretariat	Tg. Pandan		
		2 1 0 2, 6 1 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluhan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 12	300.000.000		12	200.000.000	12	200.000.000	36	700.000.000	Sekretariat	Luar Daerah		
				Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
		210612,07	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot	4. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100	868.000.000	100	77.000.000	100	82.000.000	100	1.027.000.000				
						%	%	%	%	%	%						
						6	868.000.000	4	77.000.000	4	82.000.000	14	1.027.000.000				
						Jenis	Jenis	Jenis	Jenis	Jenis	Jenis						
						100	100	100	100	100	100						
						%	%	%	%	%	%						
		210612,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran Jenis Barang Milik Daerah	n/a	4	420.000.000	Unit	420.000.000	4	420.000.000	Unit	420.000.000	Sekretariat	Tg. Pandan		
						Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit						
						1	300.000.000	1	300.000.000	8	12.000.000						
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan									
						Keluaran	Keluaran	Keluaran									
						%	%	%									
		210612,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran Jenis Barang Milik Daerah	n/a	4	420.000.000	Unit	420.000.000	4	420.000.000	Unit	420.000.000	Sekretariat	Tg. Pandan		
						Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit						
						1	300.000.000	1	300.000.000	8	12.000.000						
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan									
						Keluaran	Keluaran	Keluaran									
						%	%	%									

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir)					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			
		21020610706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	n/a	7	140.000.000	4	75.000.000	5	80.000.000	16	295.000.000	Sekretariat	Tg. Pandan			
		210206108	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kotora	3. Persentase Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	100	%	317.091.000	100	317.091.000	%	317.091.000	100	951.273.000					
		210206108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi Perangkat Daerah	100	%	317.091.000	100	317.091.000	%	317.091.000	100	951.273.000					
		21020610801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil Persentase Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	100	%	1.200.000	100	1.200.000	%	1.200.000	36	3.600.000	Sekretariat	Tg. Pandan			
		21020610802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	%	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	36	450.000.000	Sekretariat	Tg. Pandan			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir)			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2 1 0 2, 00 6 1 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	165.891.000	12	165.891.000	12	165.891.000	36	497.673.000	Sekretariat	Tg. Pandan
		2 1 0 2, 00 6 1 08 04	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot	4. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Lap	100	100	215.000.000	100	217.000.000	100	217.000.000	100	649.000.000		
		2 1 0 2, 00 6 1 09 01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran	Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	3	3	215.000.000	3	217.000.000	3	217.000.000	Jenis	649.000.000		
		2 1 0 2, 00 6 1 09 01	Pemeliharaan, Perorangan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan	Hasil	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	100		Jenis		100		100			
		2 1 0 2, 00 6 1 09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan	Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14	15	90.000.000	20	117.000.000	20	117.000.000	20	324.000.000	Sekretariat	Tg. Pandan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
		2102,06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	62 Unit	63	50.000.000	63	50.000.000	63	50.000.000	63	150.000.000	Sekretariat	Tg. Pandan		
		2102,06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Keluaran Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2	75.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	175.000.000	Sekretariat	Tg. Pandan		
		2102,06	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase diseminasi informasi kebijakan yang didiseminasikan	100 %	100	1.725.500.000	100 %	1.035.000.000	100 %	1.095.000.000	100 %	3.855.500.000				
		2102,06	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran Persentase Layanan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah yang optimal	100 %	100	1.725.500.000	100 %	1.035.000.000	100 %	1.095.000.000	100 %	3.855.500.000				
				Hasil Terkelolanya informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten	100 %	100		100 %		100 %		100 %					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2 1 0 2, 6 2 01 02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Keluhan Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12 Dokumen	13 Dokumen	60.000.000 Dokumen	13 Dokumen	65.000.000 Dokumen	13 Dokumen	70.000.000 Dokumen	39 Dokumen	195.000.000 Dokumen	Bid. IKP	Tg. Pandan, Sijuk, Badau, Mambalong, Selat Nasik
		2 1 0 2, 6 2 01 05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Keluhan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	850.000.000 Dokumen	1 Dokumen	700.000.000 Dokumen	1 Dokumen	700.000.000 Dokumen	3 Dokumen	2.250.000.000 Dokumen	Bid. IKP	Tg. Pandan, Sijuk, Badau, Mambalong, Selat Nasik
		2 1 0 2, 6 2 01 06	Pelayanan Informasi Publik	Keluhan Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	65.500.000 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000 Dokumen	3 Dokumen	210.500.000 Dokumen	Bid. IKP	Tg. Pandan, Luar Daerah
		2 1 0 2, 6 2 01 07	Layanan Hubungan Media	Keluhan Jumlah Layanan Hubungan Media	1 Layanan	1 Layanan	700.000.000 Layanan	1 Layanan	125.000.000 Layanan	1 Layanan	150.000.000 Layanan	3 Layanan	975.000.000 Layanan	Bid. IKP	Tg. Pandan, Sijuk, Badau, Mambalong, Selat Nasik
		2 1 0 2, 6 2 01 08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Keluhan Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000 Dokumen	3 Dokumen	225.000.000 Dokumen	Bid. IKP	Tg. Pandan, Sijuk, Badau, Mambalong, Selat Nasik

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2106302	Program Aplikasi Informatika	Persentase terintegrasinya sistem informasi pelayanan publik dan birokrasi	100 %	97 %	5.846.000.000	98 %	5.285.000.000	99 %	5.730.800.000	99 %	16.861.800.000		
		2106302	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran Persentase Layanan Nama Domain dan Sub Domain yang dikelola dengan baik	100 %	100 %	2.556.000.000	100 %	2.556.000.000	100 %	2.556.000.000	100 %	7.668.000.000		
		2106302	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Hasil Terkelolanya Nama Domain di Lingkup Pemerintah Kabupaten Belitung dan Pemerintah desa di Kabupaten Belitung	100 %	100 %	6.000.000	100 %	6.000.000	100 %	6.000.000	100 %	18.000.000	Bid. Aptika	Tg. Pandan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2102,00630102	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	n/a	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	Bid. Aptika	Tg. Pandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik
		2102,00630103	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintahan Daerah	Keluaran Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintahan Daerah	40	40	2.500.000.000	40	2.500.000.000	40	2.500.000.000	40	7.500.000.000	Bid. Aptika	Tg. Pandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik
		2102,006302	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran Persentase Layanan Sistem Berbasis Elektronik Pemerintahan Kabupaten Belitung yang dikelola dengan baik	100	100	3.290.000.000	100	2.729.000.000	100	3.174.800.000	100	9.193.800.000		
				Hasil Terkelolanya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintahan Kabupaten Belitung	% 100	% 100		% 100		% 100		% 100			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir)			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
		2102,00630201	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	1	20.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	3	75.000.000	Bid. Aptika	Tg. Pandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	
		2102,00630202	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1	1	1.000.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	1.200.000.000	Bid. Aptika	Tg. Pandan	
		2102,00630203	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kelurahan Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	2	2	850.000.000	2	900.000.000	2	1.000.000.000	2	2.750.000.000	Bid. Aptika	Tg. Pandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	
		2102,00630204	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintahan Daerah	Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintahan Daerah	1	1	250.000.000	1	300.000.000	1	360.000.000	3	910.000.000	Bid. Aptika	Tg. Pandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
		2 1 0 2, 6 3 02 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1	1	200.000.000	1	240.000.000	1	288.000.000	3	728.000.000	Bid. Aptika	Tg. Pandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik		
		2 1 0 2, 6 3 02 06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Kelurahan Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	n/a	31	20.000.000	31	24.000.000	31	28.800.000	31	72.800.000	Bid. Aptika	Tg. Pandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik		
		2 1 0 2, 6 3 02 07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kelurahan Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	1	1	200.000.000	1	240.000.000	1	288.000.000	1	728.000.000	Bid. Aptika	Tg. Pandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik		
		2 1 0 2, 6 3 02 08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan	Kelurahan Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan Daerah	1	1	200.000.000	1	240.000.000	1	288.000.000	1	728.000.000	Bid. Aptika	Tg. Pandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
		2102,00630209	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kelurahan Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	n/a	1	300.000.000	1	360.000.000	1	432.000.000	3	1.092.000.000	Bid. Aptika	Tg. Pandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik		
		2102,00630210	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kelurahan Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	n/a	1	200.000.000	1	240.000.000	1	288.000.000	3	728.000.000	Bid. Aptika	Tg. Pandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik		
		2102,00630211	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Kelurahan Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	n/a	1	50.000.000	1	60.000.000	1	72.000.000	3	182.000.000	Bid. Aptika	Tg. Pandan		
1. Tersedia 1. data 2. statistik sektoral yang berkualitas				Percentase data statistik sektoral yang berkualitas	n/a	65		70		75		75					
		22002	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Percentase Perangkat Daerah (PD) yang memanfaatkan data statistik sektoral	100	100	390.000.000	100	290.000.000	100	340.000.000	100	1.020.000.000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi				
							2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir)							
							Rp		Rp		Rp		Rp				Target		Rp	
							Target	(7)	Target	(8)	Target	(9)	Target	(10)			Target	(11)	Target	(12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)												(15)	(16)		
		22020201	Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran	100	800	390.000,00	1000	290.000,000	1200	340.000,000	3000	1.020.000,000							
				Hasil	%	Data		Data		Data		Data				100				
						100		100		100		100				%				
		22020201	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor	Keluaran	3	3	260.000,00	3	235.000,000	3	235.000,000	9	730.000,000	Bid. KIPS	Tg. Pandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik					
					Dok					Dok		Dok				Dok				
		22020202	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Keluaran	40	40	50.000,000			40	50.000,000	80	100.000,000	Bid. KIPS	Tg. Pandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik					
					Orang					Orang		Orang				Orang				
		22020203	Membangun Metadata Statistik Sektor	Keluaran	n/a	1	30.000,000	1	30.000,000	1	30.000,000	3	90.000,000	Bid. KIPS	Tg. Pandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik					
						Dok		Dok		Dok		Dok				Dok				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir)			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
		2202020105	Pengembangan Infrastruktur	Keluaran Jumlah Infrastruktur Statistik	n/a	2	50.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	4	100.000.000	Bid. KIPS	Tg. Pandan	
	I. Terwujudnya tata kelola dan layanan keamanan an informasi Pemerintah Daerah yang optimal			Tingkat kematangan keamanan informasi	Level II+	60		65		70		70				
		2202020105	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi	n/a	60	290.000.000	65	250.000.000	70	260.000.000	70	800.000.000			
		2202020105	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terselenggaranya Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)	100	80	265.000.000	80	220.000.000	90	225.000.000	90	710.000.000			
				Hasil Peningkatan Komitmen, efektifitas, dan kinerja pemerintah daerah dalam pengamanan informasi	100	80		80		90		90				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		2 2 0 2, 00 1 2 01 01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kelurahan Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	n/a	1 Dok	120.000.000					1 Dok	120.000.000	Bid. KIPS	Tg. Pandan
		2 2 0 2, 00 1 2 01 02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kelurahan Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	35.000.000	1 Laporan	105.000.000	1 Laporan	110.000.000	3 Laporan	250.000.000	Bid. KIPS	Tg. Pandan
		2 2 0 2, 00 1 2 01 03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kelurahan Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	1 Laporan	45.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	3 Laporan	145.000.000	Bid. KIPS	Tg. Pandan
		2 2 0 2, 00 1 2 01 04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kelurahan Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	31 Perangkat Daerah	31 Perangkat Daerah	65.000.000	31 Perangkat Daerah	65.000.000	31 Perangkat Daerah	65.000.000	31 Perangkat Daerah	195.000.000	Bid. KIPS	Tg. Pandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (s-d akhir)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		22020202	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran	n/a	1	25.000.000	2	30.000.000	1	35.000.000	4	90.000.000		
						Titik		Titik		Titik		Titik			
				50		65		80		80		%			
				Hasil		%		%		%		%			
		22020201	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran	n/a	15	25.000.000	20	30.000.000	25	35.000.000	25	90.000.000	Bid. KIPS	Tg. Pandan
						Perangkat Daerah		Perangkat Daerah		Perangkat Daerah		Perangkat Daerah			
JUMLAH						15.849.591.000		13.584.091.000		14.154.891.000		43.588.573.000			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengingat eratnya kaitan antara Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Belitung harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Perangkat Daerah yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Tujuan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Belitung, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Tujuan dalam RPD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Kinerja			Kondisi kinerja pada akhir periode RPD
	Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Indikator Tujuan					
Indeks Domain Layanan SPBE (Layanan publik dan administrasi pemerintahan)	Belum Tersedia	3,3	3,4	3,5	3,5
Indikator Sasaran					
Persentase Pelayanan Komunikasi dan Informatika yang Optimal	96,34%	95%	95.50%	96%	96%
Persentase Data Statistik Sektoral yang Berkualitas	Belum Tersedia	65%	70%	75%	75%
Tingkat Kematangan Keamanan Informasi	Level II+	60%	65%	70%	70%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 ini merupakan pedoman dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Belitung sesuai dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 79 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung. Selain itu Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026. Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 dilatarbelakangi oleh berakhirnya masa jabatan Bupati pada Tahun 2023.

Untuk pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien perlu adanya koordinasi yang berkesinambungan dalam melaksanakan proses pembangunan untuk bersama-sama mencapai tujuan pembangunan kabupaten belitung. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan sikap mental, tekad, semangat, komitmen, ketaatan dan disiplin aparatur dan dukungan masyarakat dan kalangan usaha.

Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan tujuan daerah yang ingin dicapai. Akhir kata semoga Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan pembangunan Kabupaten Belitung.

Tanjungpandan, 25 Juli 2023

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Belitung



MOHAMMAD IQBAL, ST
NIP. 19641107 200003 1 002